

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KARETAN: ANALISIS PERSPEKTIF FEMINISME LIBERAL

Aiman Zikri Fadil^{1*}, Agus Fauzi², Ahmad Ridwan³
¹²³Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

e-mail: 24040564036@mhs.unesa.ac.id¹, agusmfauzi@unesa.ac.id²,
ahmadridwan@unesa.ac.id³

DOI: <https://doi.org/10.30742/juispol.v6i1.5302>

Received: 7 Maret 2026

Revised: 18 Mei 2026

Accepted: 23 Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bentuk dan kualitas keterlibatan politik perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Karetan dengan pendekatan perspektif feminisme liberal yang menekankan pada kesetaraan hak, kesempatan, dan kebebasan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen untuk memahami interaksi gender dalam forum musyawarah desa. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perempuan di Desa Karetan secara struktural memiliki akses yang baik ke Musrenbangdes melalui perangkat desa, jaringan organisasi perempuan, serta media komunikasi masyarakat. Akan tetapi, kualitas partisipasi perempuan masih bervariasi. Perempuan yang terlibat dalam organisasi seperti PKK cenderung lebih aktif menyampaikan pendapat dan mengusulkan program, sementara perempuan yang tidak tergabung dalam organisasi sosial sering berperan pasif karena hambatan psikologis, keterbatasan pengalaman berorganisasi, serta beban domestik. Kontribusi perempuan dalam musyawarah lebih berfokus pada isu-isu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan keluarga, kebersihan lingkungan, dan penguatan ekonomi rumah tangga, sehingga memperkaya agenda pembangunan desa yang sebelumnya lebih terfokus pada infrastruktur. Dalam perspektif feminisme liberal, temuan ini menunjukkan bahwa kesetaraan formal mulai terwujud, namun kesetaraan substansif masih memerlukan peningkatan kapasitas, dukungan sosial, dan strategi pemberdayaan perempuan agar partisipasi dalam pembangunan desa menjadi lebih inklusif.

Kata kunci: partisipasi_politik_perempuan, Musrenbangdes, feminisme_liberal, Pembangunan_desa, gender_dan_kebijakan_publik.

Abstract

This study aims to evaluate the form and quality of women's political involvement in the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) in Karetan Village using a liberal feminist perspective that emphasizes the equality of rights, opportunities, and freedoms of women in the public decision-making process. The method used in this study is qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and document collection to understand gender interactions in the village deliberation forum. The research findings indicate that women in Karetan Village structurally have good access to Musrenbangdes through village officials, women's organization networks, and community communication media. However, the quality of women's participation still

varies. Women involved in organizations such as the PKK tend to be more active in expressing opinions and proposing programs, while women who are not members of social organizations often play a passive role due to psychological barriers, limited organizational experience, and domestic burdens. Women's contributions to the deliberations are more focused on issues such as public health, family education, environmental cleanliness, and strengthening the household economy, thereby enriching the village development agenda which was previously more focused on infrastructure. From a liberal feminist perspective, these findings indicate that formal equality is beginning to be realized, but substantive equality still requires capacity building, social support, and women's empowerment strategies so that participation in village development becomes more inclusive.

Keywords: women's_political_participation, village_planning_forum, liberal_feminism, village_development, gender_and_public_policy.

1. PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting untuk mengevaluasi kualitas demokrasi serta inklusivitas dalam proses pembangunan. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi tanpa diskriminasi gender dari semua kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pembangunan desa, peran perempuan menjadi semakin penting karena mereka memiliki pengalaman sosial yang berbeda dalam konteks keluarga dan masyarakat. Kehadiran perempuan di forum publik tidak hanya meningkatkan representasi kelompok tertentu tetapi juga memberikan sudut pandang baru dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa dianggap sebagai bagian dari usaha memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi salah satu ruang formal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menetapkan prioritas pembangunan. Forum ini dirancang untuk memastikan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan melalui proses musyawarah yang terbuka dan inklusif. Secara normatif, Musrenbangdes memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga, termasuk

perempuan, untuk terlibat dalam diskusi kebijakan desa. Namun, dalam praktiknya, partisipasi ini tidak selalu berlangsung setara karena banyak faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang partisipasi formal belum tentu menghasilkan kontribusi yang nyata dari seluruh kelompok masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam proses partisipasi politik di tingkat lokal. Hambatan tersebut bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan norma sosial yang membentuk relasi gender di masyarakat. Suryadi (2017) menyatakan bahwa perempuan di Indonesia sering kali terjebak dalam stereotip sosial yang menempatkan laki-laki sebagai tokoh dominan di ruang publik, sedangkan perempuan lebih identik dengan peran di ranah domestik. Hal ini membuat banyak perempuan merasa kurang percaya diri untuk menyuarakan pendapat mereka di forum publik. Sebagai hasilnya, partisipasi perempuan dalam politik sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak selalu membawa dampak pada keputusan yang diambil.

Selain faktor budaya patriarki, beban domestik juga menjadi salah satu hambatan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dalam banyak masyarakat pedesaan, perempuan masih memikul tanggung jawab utama dalam

mengurus rumah tangga dan keluarga. Malihah (2020) menyoroti bahwa pembagian peran domestik yang tidak seimbang dapat membatasi waktu dan tenaga perempuan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik di masyarakat. Kondisi ini menciptakan situasi di mana perempuan memiliki akses formal ke forum publik, tetapi kekurangan waktu dan dukungan sosial yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, kesetaraan formal dalam partisipasi tidak selalu mencerminkan kesetaraan yang nyata dalam praktik.

Di sisi lain, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa organisasi perempuan di tingkat masyarakat memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Organisasi seperti PKK, kelompok arisan, dan komunitas perempuan lainnya sering menjadi ruang belajar sosial yang memungkinkan perempuan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Prillaman (2023) menemukan bahwa kelompok perempuan dapat memperkuat solidaritas sosial serta meningkatkan keberanian perempuan untuk berbicara di ruang publik. Melalui interaksi sosial yang intens, perempuan dapat memperoleh pengalaman organisasi yang membantu mereka memahami cara pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dengan demikian, organisasi perempuan berperan sebagai sarana pemberdayaan politik yang mendorong partisipasi perempuan dalam forum formal.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Goyal (2024) yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam organisasi akar rumput dapat meningkatkan literasi politik dan kemampuan advokasi mereka. Organisasi perempuan sering menjadi wadah awal bagi perempuan untuk belajar menyampaikan aspirasi dan membangun jaringan sosial. Proses ini membantu perempuan mengembangkan kepercayaan diri untuk terlibat dalam proses politik yang lebih luas. Ketika perempuan memiliki pengalaman organisasi yang cukup, mereka

cenderung lebih aktif dalam forum musyawarah dan mampu menyampaikan aspirasi dan keresahannya secara lebih terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan individu dan dukungan sosial memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas partisipasi perempuan.

Dalam konteks pembangunan desa, Musrenbangdes seharusnya berfungsi sebagai forum yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat secara adil. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah menjadi elemen kunci dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia. Menurut Nainggolan, dkk. (2022), Musrenbangdes dibuat sebagai sarana untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Melalui forum ini, masyarakat punya kesempatan untuk mengajukan program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, penerapan prinsip partisipasi ini sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya.

Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun perempuan hadir dalam forum Musrenbangdes, pengaruhnya dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Fitrah (2019) mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes sering kali sebatas kehadiran fisik tanpa keterlibatan aktif dalam diskusi. Tokan dan Gai (2020) juga mengungkapkan bahwa keputusan terkait pembangunan desa sering kali didominasi oleh pendapat dan keputusan laki-laki, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara partisipasi formal dan partisipasi substansif dalam proses pembangunan desa. Dengan demikian, walaupun perempuan hadir dalam forum, hal itu belum tentu mencerminkan adanya kekuatan politik yang setara.

Dalam memahami fenomena ini, perspektif feminisme liberal dapat diterapkan sebagai pendekatan analisis yang relevan. Feminisme liberal

menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan publik. Abbas (2020) menjelaskan bahwa feminisme liberal berfokus pada upaya menghapus hambatan sosial dan institusional yang mencegah perempuan untuk mengakses ruang publik. Perspektif ini menganggap bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses politik jika diberikan kesempatan yang setara. Oleh karena itu, analisis terhadap partisipasi perempuan tidak hanya melihat keberadaan aturan formal, tetapi juga kemampuan individu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Dalam konteks feminisme liberal, kualitas partisipasi perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Rasa percaya diri, pengalaman organisasi, serta dukungan sosial merupakan elemen penting yang menentukan keberanian perempuan untuk menyampaikan pendapat di forum publik. Nasrullah (2021) menekankan bahwa kesetaraan formal dalam kebijakan publik harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar mereka mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Tanpa dukungan sosial yang memadai, perempuan cenderung tetap berada dalam posisi marginal meskipun memiliki akses ke forum politik. Oleh karena itu, analisis terhadap partisipasi perempuan perlu mempertimbangkan interaksi antara struktur formal dan dinamika sosial yang memengaruhi perilaku individu.

Di Desa Karetan, partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes menunjukkan dinamika yang menarik untuk diteliti. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perempuan yang hadir dalam forum musyawarah desa meningkat. Ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang menciptakan peluang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan. Meski demikian, tingkat partisipasi aktif perempuan masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan.

Beberapa perempuan mampu menyampaikan pendapat dan memberikan usulan program, sementara yang lain memilih untuk tetap pasif dalam diskusi forum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tidak dapat dilihat hanya dari tingkat kehadiran dalam forum musyawarah. Partisipasi yang nyata mencakup kemampuan untuk menyampaikan pendapat, mempengaruhi keputusan, serta berperan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Dalam banyak kasus, perempuan yang tergabung dalam organisasi sosial seperti PKK cenderung berperan lebih aktif dalam forum diskusi. Di sisi lain, perempuan yang tidak memiliki pengalaman dalam organisasi seringkali merasa tidak percaya diri untuk berbicara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan internal di antara kelompok perempuan dalam memanfaatkan ruang partisipasi yang ada.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kapasitas individu, dukungan sosial, pengalaman organisasi, serta hambatan psikologis dan domestik. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam membentuk kualitas partisipasi perempuan dalam forum musyawarah desa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antar faktor tersebut menjadi penting untuk menjelaskan variasi tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes. Hubungan antar faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Partisipasi Politik Perempuan dalam Musrenbangdes

Sumber: Dibuat oleh Peneliti

Gambar tersebut menggambarkan hubungan antara beberapa faktor utama yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes, yaitu akses informasi, dukungan organisasi, pengalaman sosial, serta hambatan psikologis dan domestik. Dalam perspektif feminisme liberal, kesetaraan formal dalam akses forum tidak selalu menghasilkan partisipasi yang substantif apabila perempuan tidak memiliki kapasitas dan dukungan sosial yang memadai. Oleh karena itu, kualitas partisipasi perempuan dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia dalam forum musyawarah. Interaksi antara faktor struktural dan faktor individual inilah yang kemudian membentuk variasi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Oleh karena itu, penelitian mengenai partisipasi perempuan perlu mempertimbangkan pengalaman subjektif perempuan serta dinamika interaksi sosial yang terjadi dalam forum musyawarah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana perempuan memaknai ruang partisipasi yang ada. Di samping itu, analisis faktor-faktor ini juga bisa membantu menemukan strategi pemberdayaan yang lebih tepat bagi perempuan.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian sebelumnya, masih terdapat keterbatasan atau gap dalam kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara kapasitas individu perempuan, dukungan sosial, dan

struktur forum dalam memengaruhi kualitas partisipasi perempuan. Mayoritas penelitian hanya menekankan pada seberapa banyak perempuan hadir dalam forum musyawarah tanpa mengeksplorasi lebih dalam pengalaman partisipasi mereka. Padahal, kualitas partisipasi perempuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbicara, tingkat kepercayaan diri, dan jaringan sosial yang dimiliki oleh perempuan. Oleh karena itu, penelitian yang meneliti aspek-aspek tersebut sangat penting untuk memahami dinamika partisipasi perempuan secara lebih menyeluruh. Analisis mendalam dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian feminisme dan politik lokal.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi politik perempuan dalam Musrenbangdes Desa Karetan melalui feminisme liberal. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana perempuan memanfaatkan ruang partisipasi yang ada, serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas keterlibatan mereka. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi peran organisasi perempuan dalam meningkatkan kapasitas partisipasi politik perempuan di tingkat desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan lokal. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif gender dalam proses pembangunan desa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika partisipasi politik perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Karetan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman sosial, interaksi, serta makna yang diberikan oleh perempuan terhadap ruang partisipasi yang tersedia dalam forum musyawarah desa.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana perempuan memaknai kesempatan, hambatan, serta strategi yang mereka gunakan dalam proses partisipasi politik di tingkat lokal. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung dinamika komunikasi dan relasi sosial yang terjadi selama proses musyawarah berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk dan kualitas partisipasi perempuan dalam proses pembangunan desa dari perspektif feminisme liberal.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karetan yang menjadi lokasi kegiatan Musrenbangdes dan aktivitas sosial masyarakat yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan desa. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut menunjukkan dinamika partisipasi perempuan yang cukup menarik untuk dikaji. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perempuan yang hadir dalam forum musyawarah desa mengalami peningkatan, meskipun tingkat partisipasi aktif mereka masih bervariasi. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi perempuan dalam forum pembangunan desa. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16–25 September 2025 bertepatan dengan kegiatan PLK yang memungkinkan peneliti melakukan observasi secara intensif terhadap proses musyawarah dan interaksi sosial masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, serta pandangan perempuan terkait keterlibatan mereka dalam Musrenbangdes. Informan

penelitian meliputi perempuan yang terlibat dalam forum musyawarah, perangkat desa, serta beberapa tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam proses perencanaan pembangunan desa. Observasi lapangan dilakukan selama kegiatan Musrenbangdes untuk mengamati secara langsung pola interaksi, distribusi kesempatan berbicara, serta dinamika komunikasi yang terjadi dalam forum musyawarah. Sementara itu, dokumentasi berupa catatan rapat, arsip kegiatan desa, serta foto kegiatan digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes. Selain itu, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memverifikasi konsistensi data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan triangulasi ini penting untuk meningkatkan validitas serta kredibilitas temuan penelitian dalam konteks penelitian kualitatif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Grounded Theory yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Pada tahap open coding, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep awal yang muncul dari data lapangan terkait pengalaman partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes. Selanjutnya, pada tahap axial coding peneliti menghubungkan berbagai kategori yang ditemukan untuk memahami hubungan antara faktor penyebab, konteks sosial, strategi partisipasi, serta dampaknya terhadap proses

musyawarah. Tahap selective coding dilakukan untuk menentukan kategori utama yang dapat menjelaskan keseluruhan fenomena partisipasi perempuan dan kemudian ditafsirkan menggunakan perspektif feminisme liberal.

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola-pola yang menjelaskan variasi tingkat partisipasi perempuan dalam forum Musrenbangdes. Analisis tidak hanya berfokus pada tingkat kehadiran perempuan dalam forum, tetapi juga pada kualitas keterlibatan mereka dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan. Perspektif feminisme liberal digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana akses, kesempatan, dan kapasitas perempuan mempengaruhi partisipasi politik mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan hubungan antara struktur forum musyawarah, dukungan sosial, serta pengalaman organisasi dalam membentuk partisipasi perempuan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Akses Perempuan terhadap Informasi dan Ruang Musyawarah

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perempuan di Desa Karetan memiliki akses yang terbuka terhadap informasi mengenai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Informasi mengenai kegiatan musyawarah biasanya disebarkan melalui perangkat desa, jaringan organisasi perempuan seperti PKK, serta media komunikasi masyarakat seperti grup WhatsApp. Metode penyampaian informasi ini mencerminkan adanya praktik transparansi informasi di tingkat desa yang memberikan akses kepada masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi

masyarakat yang menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan musyawarah pembangunan. Firmansyah dkk. (2023) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang.

Berdasarkan observasi langsung, perempuan di Desa Karetan tidak lagi berada dalam posisi yang sepenuhnya terpinggirkan dalam forum Musrenbangdes. Dari total 59 peserta yang hadir dalam musyawarah desa, sekitar 20 peserta merupakan perempuan yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki representasi yang cukup signifikan dalam forum musyawarah pembangunan desa. Kehadiran perempuan dalam forum ini mencerminkan adanya perubahan dalam praktik demokrasi desa yang semakin inklusif terhadap partisipasi berbagai kelompok masyarakat. Temuan ini sejalan dengan yang dikatakan Arifin dan Putra Adela (2018) yang menyebutkan bahwa demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh upaya pemerintah desa untuk membuka ruang diskusi bagi semua warga tanpa memandang latar belakang sosial mereka.

Namun, kehadiran perempuan dalam forum Musrenbangdes belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan partisipasi dalam proses diskusi. Beberapa perempuan hadir dalam forum musyawarah tetapi tidak secara aktif menyampaikan pendapat atau usulan program pembangunan. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara partisipasi formal dan substansif dalam proses pembangunan desa. Fitrah (2019) menekankan bahwa dalam banyak kasus Musrenbang desa, kehadiran masyarakat tidak selalu disertai dengan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa akses ke forum partisipasi tidak selalu menghasilkan kontribusi yang setara dari seluruh peserta.

Perempuan yang tergabung dalam organisasi seperti PKK umumnya memiliki akses informasi yang lebih baik

dibandingkan mereka yang tidak tergabung dalam organisasi. Ini terjadi karena organisasi perempuan berfungsi sebagai jaringan sosial yang memudahkan penyebaran informasi tentang kegiatan desa. Melalui pertemuan rutin organisasi, anggota PKK menerima informasi mengenai agenda Musrenbangdes serta isu pembangunan yang akan dibahas di forum tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa organisasi perempuan memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi politik perempuan di tingkat desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prillaman (2023) dan Goyal (2024) yang menunjukkan bahwa kelompok perempuan di lapangan dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Sebaliknya, perempuan yang tidak tergabung dalam organisasi sosial sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang kegiatan musyawarah desa. Informasi mengenai Musrenbangdes biasanya diperoleh melalui pengumuman umum atau komunikasi informal antar warga. Keadaan ini menyebabkan banyak perempuan tidak memiliki persiapan yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum musyawarah. Dalam sudut pandang feminisme liberal, kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan akses partisipasi secara formal tidak selalu berujung pada kesetaraan yang nyata dalam praktik. Abbas (2020) dan Nasrullah (2021) menjelaskan bahwa kesempatan formal bagi perempuan untuk berpartisipasi harus disertai dengan peningkatan kapasitas individu agar perempuan dapat memanfaatkan ruang partisipasi yang ada.

3.2. Kesempatan Bicara, Pola Interaksi, dan Hambatan Internal Perempuan

Forum Musrenbangdes di Desa Karetan secara formal memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menyampaikan pendapat. Kepala desa dan perangkat desa menyatakan bahwa tidak terdapat aturan yang membatasi perempuan untuk berbicara dalam forum

musyawarah. Moderator forum bahkan berusaha memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap program pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural forum musyawarah telah dirancang untuk bersifat inklusif. Ansar (2021) menegaskan bahwa kepemimpinan desa yang terbuka dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan.

Meskipun kesempatan formal tersebut tersedia, tidak semua perempuan memanfaatkannya untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perempuan yang secara aktif menyampaikan pendapat atau usulan program pembangunan. Sebagian perempuan lainnya lebih memilih untuk menjadi pendengar selama proses musyawarah berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan formal untuk berbicara tidak selalu diikuti oleh keberanian individu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Fenomena ini memperkuat temuan Suryadi (2017) yang menyatakan bahwa perempuan sering mengalami hambatan psikologis dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Hambatan psikologis menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam forum musyawarah desa. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka merasa kurang percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Ketakutan untuk melakukan kesalahan atau menyampaikan pendapat yang dianggap tidak penting sering kali membuat perempuan memilih untuk tidak berbicara dalam forum diskusi. Humairatuzzahrah (2018) menjelaskan bahwa norma sosial yang berkembang di masyarakat sering menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam ruang publik. Akibatnya, perempuan cenderung membatasi diri dalam menyampaikan pendapat dalam forum politik.

Selain faktor psikologis, beban domestik juga memengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan desa. Banyak perempuan di Desa Karetan masih memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus rumah tangga dan keluarga. Kondisi ini membuat sebagian perempuan mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara kegiatan domestik dan kegiatan sosial di masyarakat. Malihah (2020) menjelaskan bahwa pembagian peran domestik yang tidak seimbang sering menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik. Temuan ini juga sejalan dengan Wahyuni Iskandar (2021) yang menunjukkan bahwa perempuan di banyak daerah masih menghadapi dilema antara peran domestik dan partisipasi politik.

Di sisi lain, perempuan yang aktif dalam organisasi PKK menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menyampaikan pendapat di forum Musrenbangdes. Pengalaman organisasi yang mereka miliki membantu meningkatkan kemampuan komunikasi serta keberanian untuk berbicara di depan publik. Organisasi perempuan sering menjadi ruang latihan sosial yang memungkinkan perempuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi. Dalam konteks ini, PKK dapat berfungsi sebagai arena pembelajaran politik informal bagi perempuan di tingkat desa. Dengan demikian, pengalaman organisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi perempuan.

Dalam perspektif feminisme liberal, fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan perempuan dalam berpartisipasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan formal. Kesetaraan partisipasi juga dipengaruhi oleh kapasitas individu serta dukungan sosial yang tersedia bagi perempuan. Abbas (2020) menekankan bahwa feminisme liberal berupaya menghapus hambatan sosial yang membatasi

perempuan dalam mengakses ruang publik. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan memerlukan strategi pemberdayaan yang mampu memperkuat kapasitas individu serta jaringan sosial perempuan di tingkat komunitas.

3.3. Kontribusi Nyata dari Perempuan dan Dampaknya terhadap Keputusan Musrenbangdes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Desa Karetan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam proses diskusi Musrenbangdes. Usulan yang disampaikan oleh perempuan umumnya berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat, pendidikan keluarga, kebersihan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Isu-isu tersebut mencerminkan pengalaman sosial perempuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengelola rumah tangga dan anggota komunitas. Dengan demikian, partisipasi perempuan mampu memperkaya perspektif pembangunan desa yang sebelumnya lebih berfokus pada pembangunan fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam memperluas agenda pembangunan desa.

Beberapa anggota PKK secara aktif menyampaikan laporan mengenai kegiatan posyandu serta kebutuhan masyarakat terkait kesehatan keluarga. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mempertimbangkan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, perempuan juga mengusulkan program pelatihan usaha mikro dan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan. Usulan tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai peserta forum, tetapi juga sebagai sumber informasi penting bagi perencanaan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Tokan dan Gai (2020) serta Astuti et al. (2019) yang menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi pengusul

program pembangunan berbasis kesejahteraan sosial.

Kontribusi perempuan dalam Musrenbangdes juga memberikan dampak positif terhadap kualitas keputusan pembangunan desa. Kehadiran perspektif perempuan memungkinkan munculnya isu-isu sosial yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam diskusi pembangunan desa. Kepala desa menyatakan bahwa diskusi musyawarah menjadi lebih komprehensif sejak perempuan mulai terlibat aktif dalam forum. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dapat memperkaya proses deliberasi dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan memiliki implikasi penting bagi kualitas demokrasi lokal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Verba dan Nie (1972) yang menyatakan bahwa partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Ketika berbagai kelompok sosial memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Musrenbangdes, partisipasi perempuan memungkinkan munculnya perspektif yang lebih beragam dalam diskusi pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman partisipasi dapat memperkuat proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat demokrasi partisipatif.

Namun demikian, kontribusi perempuan dalam Musrenbangdes masih belum merata di antara seluruh kelompok perempuan. Sebagian besar usulan program pembangunan masih berasal dari perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK. Perempuan yang tidak memiliki pengalaman organisasi cenderung lebih jarang menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah. Kondisi ini menunjukkan

adanya kesenjangan internal dalam partisipasi perempuan di tingkat desa. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan perempuan perlu difokuskan pada kelompok perempuan yang belum memiliki akses terhadap jaringan organisasi.

Dalam perspektif feminisme liberal, kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan formal dalam partisipasi belum sepenuhnya menghasilkan kesetaraan substantif. Perempuan memang telah memiliki kesempatan untuk hadir dan berbicara dalam forum musyawarah desa. Namun kesempatan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh perempuan karena perbedaan kapasitas individu dan dukungan sosial. Adriani dan Maulia (2024) menekankan bahwa pendidikan politik bagi perempuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi mereka. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan perlu difokuskan pada peningkatan literasi politik serta penguatan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Karetan telah mengalami perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Perempuan tidak lagi sepenuhnya terpinggirkan dalam proses perencanaan pembangunan desa, melainkan mulai mendapatkan akses ke forum musyawarah sebagai forum untuk berpartisipasi secara politik di tingkat lokal. Kehadiran perempuan dalam Musrenbangdes mencerminkan adanya transformasi dalam praktik demokrasi desa yang semakin inklusif terhadap berbagai kelompok masyarakat. Partisipasi ini dapat dilihat tidak hanya dari jumlah kehadiran perempuan dalam forum, tetapi juga dari aspirasi dan ide-ide yang mereka ajukan terkait program pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam

Musrenbangdes menunjukkan bahwa proses pembangunan desa mulai bergerak menuju model partisipasi yang lebih inklusif.

Meskipun akses bagi perempuan ke forum musyawarah cukup terbuka, kualitas partisipasi mereka masih bervariasi. Beberapa perempuan berani terlibat aktif dengan menyampaikan usulan serta memberikan tanggapan dalam diskusi musyawarah. Namun, ada pula sebagian yang masih cenderung bersikap pasif karena disebabkan oleh berbagai hambatan sosial dan psikologis. Beberapa hambatan tersebut meliputi kurangnya kepercayaan diri, pengalaman organisasi yang terbatas, dan pengaruh norma sosial yang mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin di ruang publik. Situasi ini menunjukkan bahwa kesetaraan formal dalam akses partisipasi belum sepenuhnya menghasilkan kesetaraan substansif dalam praktik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa organisasi perempuan, khususnya PKK, memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes. Melalui kegiatan organisasi, perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan pemahaman tentang isu pembangunan desa. Pengalaman dalam organisasi tersebut membantu perempuan untuk lebih percaya diri saat menyampaikan aspirasi dan usulan program dalam forum musyawarah. Selain itu, jaringan sosial yang terbentuk di dalam organisasi perempuan juga mempermudah penyebaran informasi tentang kegiatan pembangunan desa. Dengan demikian, organisasi perempuan dapat berfungsi sebagai tempat pembelajaran politik informal yang memperkuat kemampuan partisipasi perempuan.

Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam Musrenbangdes memberikan

dampak positif terhadap kualitas agenda pembangunan desa. Usulan yang datang dari perempuan biasanya berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat, pendidikan keluarga, kebersihan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Isu-isu ini mencerminkan pengalaman sehari-hari perempuan yang sering kali belum sepenuhnya tercakup dalam agenda pembangunan yang lebih fokus pada infrastruktur. Masuknya perspektif perempuan dalam forum musyawarah memungkinkan lahirnya program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi perempuan dapat memperkaya proses perencanaan pembangunan desa secara lebih menyeluruh.

Dalam sudut pandang feminisme liberal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan formal dalam akses partisipasi politik mulai terbangun melalui terbukanya forum Musrenbangdes bagi perempuan. Namun, kesetaraan ini masih perlu didukung oleh peningkatan kapasitas individu dan dukungan sosial yang lebih intensif. Tanpa adanya upaya pemberdayaan yang berkelanjutan, banyak perempuan yang akan tetap berada dalam posisi pasif meskipun memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam forum musyawarah. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan perempuan seharusnya fokus pada peningkatan literasi politik, kemampuan komunikasi, serta penguatan jaringan organisasi perempuan di tingkat desa. Dengan demikian, kesetaraan formal dapat berkembang menjadi kesetaraan yang lebih berarti dalam praktik partisipasi politik.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang cukup mendalam mengenai keterlibatan perempuan dalam Musrenbangdes di Desa Karetan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian ini masih sedikit sehingga pengalaman perempuan

dari berbagai latar belakang sosial belum sepenuhnya terwakili. Selain itu, pengamatan yang dilakukan di lapangan hanya terjadi pada satu gelaran Musrenbangdes, sehingga kemungkinan adanya variasi dinamika forum pada waktu yang berbeda belum bisa dilihat secara komprehensif. Penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor eksternal seperti peran keluarga, hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga, serta dampak budaya lokal terhadap keberanian perempuan untuk terlibat. Oleh karena itu, studi lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai dinamika partisipasi politik perempuan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, ada beberapa saran strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi perempuan di Musrenbangdes. Pemerintah desa sebaiknya mengadakan pelatihan dan pendidikan politik untuk perempuan agar bisa meningkatkan kemampuan berbicara di forum publik serta pemahaman tentang proses perencanaan pembangunan desa. Selain itu, organisasi perempuan seperti PKK perlu diperkuat perannya sebagai tempat pemberdayaan sosial yang mendukung pengembangan kapasitas perempuan. Pihak desa juga harus memastikan bahwa forum Musrenbangdes berlangsung dalam suasana yang mudah dijangkau dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dapat berkembang dengan lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, N. (2020). Dampak feminisme pada perempuan. *AL-WARDAH*, 14(2), 292–299. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v14i2.292>

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi perempuan dalam politik. *JOURNAL OF PRACTICE LEARNING AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Ansar, N. (2021). KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA. <https://doi.org/10.31219/osf.io/smvh7>
- Arifin, A., & Putra Adela, F. (2018). Analysis of institutional political culture and local democracy through musyawarah desa. *PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND POLITICAL DEVELOPMENT (ICOSOP 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.77>
- Astuti, P., Afandi, M. A., & Listyani, R. H. (2019). Kajian peran dan partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. *CAKRAWALA*, 13(2), 241–254. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i2.306>
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa. *JISIP (JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Fitrah, N. (2019). Problematika pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang desa) studi kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli. *MITZAL:*

- JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI, 2(2). <https://doi.org/10.35329/mitzal.v2i2.273>
- Goyal, T. (2024). Representation from below: How women's grassroots party activism promotes equal political participation. *AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW*, 118(3), 1415–1430. <https://doi.org/10.1017/S0003055423000953>
- Humairatuzzahrah, N. (2018). Partisipasi politik perempuan dalam perkembangan demokrasi. *ADALAH*, 2(2), 195.
- Malihah, E. (2020). Partisipasi politik perempuan dalam konstruksi sosial budaya. *MEDIA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 9(3), 323–342.
- Nainggolan, D. A. M., Haloho, A. N., Purba, J., & Ginting, M. (2022). Implikasi musyawarah perencanaan pembangunan desa terhadap pembangunan (studi kasus di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara). *JURNAL REGIONAL PLANNING*, 4(2). <https://doi.org/10.36985/jrp.v4i2.666>
- Nasrullah, I. D. (2021). Pengarusutamaan gender di Jepang untuk mencapai SDGs dalam perspektif feminisme liberal. *JOURNAL OF FEMINISM AND GENDER STUDIES*, 1(2), 132. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v1i2.25281>
- Ningrum, W. S. (2024). Fenomena keberhasilan feminisme (Studi gender feminisme liberal dan feminisme radikal). *FAMILIA: JURNAL HUKUM KELUARGA*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.197>
- Prillaman, S. A. (2023). Strength in numbers: How women's groups close India's political gender gap. *AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE*, 67(2), 390–410. <https://doi.org/10.1111/ajps.12651>
- Suryadi. (2017). Partisipasi politik perempuan Indonesia dalam relasi gender. *ORASI: JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI*, 6(1), 105–118. <https://doi.org/10.24235/orasi.v6i1.1410>
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi politik perempuan: Studi relasi kuasa dan akses perempuan dalam pembangunan desa di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur. *JURNAL CARAKA PRABU*, 4(2), 213–234. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Triyo Rachmadi, T., Rahayu, T. P., Waluyo, A., & Yuliyanto, W. (2021). Musyawarah perencanaan pembangunan desa bidang kesehatan di Desa Rantewringin, Buluspesantren, Kebumen. *JURPIKAT (JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 2(3), 578–589. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.760>
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *PARTICIPATION IN AMERICA: POLITICAL DEMOCRACY AND SOCIAL EQUALITY*. Harper & Row.
- Wahyuni Iskandar, I. (2021). Women's political participations in East Kalimantan. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL*, 58(1), 3175–3183. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1223>